

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA****Yuliyanto<sup>1)</sup>**<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Akutansi, STIE Nusa MegarkencanaEmail : [yuliyanto996@gmail.com](mailto:yuliyanto996@gmail.com)**Maria Magdalena Pur Dwiastuti<sup>2)</sup>**<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Akutansi, STIE Nusa MegarkencanaEmail : [mariaastienus@gmail.com](mailto:mariaastienus@gmail.com)**Abstract**

*The management and effectiveness of the Village Fund is an assessment of the accountability of the village government to report the results of the performance of all activities that have been carried out to the community. This accountability is carried out so that the village government has performance measures with performance targets that have been planned from the start in order to obtain measurable results.*

*This study aims to determine how the Village Fund is managed and how much is the level of effectiveness of the Panggungharjo village government in managing the Village Fund. The Panggungharjo Village Government with the title of being a village government with the best absorption of Village Funds, of course, always has its own efforts and ways to maintain good performance.*

*This study uses a quantitative descriptive method, and the results of this study indicate that the management of Village Funds in the Panggungharjo village government is effective in accordance with the targets that have been planned and the right direction of goals. Because at every stage of village government management starting from planning, implementation to reporting, the community always involves the community through the Village Consultative Body (BPD).*

**Keywords:** Village Fund, Effectiveness, Village Fund management

**A. PENDAHULUAN**

Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban atas dana yang diamanatkan atau dimandatorikan oleh masyarakat kepada lembaga pemerintahan. Akuntansi sektor publik tidak sama dengan akuntansi keuangan, dimana tujuan akhir dari sektor publik adalah kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama sedangkan akuntansi keuangan yang digunakan oleh lembaga yang tujuan utamanya mencari laba adalah seberapa besar laba (profit) yang dapat dihasilkan oleh unit bisnis. Penilaian kinerja akuntansi sektor publik adalah dari sisi transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik itu sendiri, karena merupakan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dipercayakan oleh masyarakat, sehingga harus sesuai dengan tujuan utama sektor publik yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia menuntut bahwa setiap daerah otonom memiliki kemandirian dalam hal pendapatan dan pembiayaan untuk mendukung tercapainya pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diupayakan seoptimal mungkin agar daerah memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mensejahterakan masyarakatnya. Masyarakat membutuhkan pertumbuhan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah supaya dapat membantu mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Indonesia adalah negara berkembang, masyarakat yang ada masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil melalui pembangunan daerah.

Pembangunan daerah di Indonesia saat ini masih didukung oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan yang ada membentuk otonomi daerah, akan tetapi sistem keuangan yang ada di

1 )Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2 )Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

negara kita adalah sistem desentralisasi. Pemerintah pusat akan mengalokasikan dana kepada masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan proporsinya mengkombinasikan variabel yang terdapat dalam penelitian ini dengan variabel lain.

dan diatur melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat akan mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah melalui APBN yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Otoritas Khusus.

Semenjak tahun 2015 pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih besar kepada pemerintahan yang paling kecil yaitu pemerintah desa dengan mengalokasikan Dana Desa kepada setiap desa yang ada di wilayah Indonesia, hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yang ke 3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dimana tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa, serta untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Berdasarkan undang-undang ini masyarakat desa saat ini adalah subyek pembangunan bukan lagi sebagai obyek pembangunan. Desa berhak untuk mendapatkan kemajuan fasilitas yang sama dengan wilayah perkotaan. Penyaluran Dana Desa bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan desa serta menjaga pemerataan kehidupan bangsa.

Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dari tahun ke tahun semakin besar, maka setiap desa harus mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya yang terdiri dari pendapatan asli desa, maupun yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mampu membawa pada dampak pertumbuhan ekonomi desa yang baik, sehingga menciptakan kesejahteraan pada masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan salah satu dari tujuan otonomi daerah yaitu mampu mengelola daerahnya masing-masing termasuk dari sisi financial. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian seluruh aliran dana yang dialokasikan kepada daerah atau desa akan tepat sasaran dan tepat pengelolaannya.

Pengelolaan Dana Desa yang merupakan dana masyarakat yang diperoleh dari pemerintah pusat harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi karena akan mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pelaksana pengelolaan dana desa kepada masyarakat yang menjadi obyek alokasi Dana Desa. Menurut Asas pengelolaan Dana Desa adalah desa harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Desa juga harus mengelola keuangan Dana Desa yang menjadi bagian keuangan desa dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Dan desa harus mempunyai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Kinerja pemerintah desa yang efektif sangat dibutuhkan mengingat dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan desa merupakan dana dari masyarakat (publik). Sehingga seluruh pendanaan dan kegiatan harus dikembalikan atau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan alokasi dana yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

## B. KAJIAN LITERATUR

### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang

*1 )Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2 )Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta*

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Hargono DS. (2010), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Saputra I Wayan (2014) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. Menurut Mardiasmo (2004), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam Mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

## 2. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018 tentang pengelolaan

1 )Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2 )Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

transfer dana desa, khususnya ketentuan terkait penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut, tugas penyaluran, pemantauan, dan evaluasi dana desa dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan kepada Pemerintah Daerah penerima dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa).

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen) dan
  - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD. Penyaluran dana desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) menerima:
- a. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan.
  - b. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
  - c. Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
  - d. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

- a. Laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I dari Bupati/Walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari dana desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD, dan
- b. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahap I dari Bupati/Walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Ketentuan penyaluran dana desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk tahap II disampaikan ke KPPN. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran dana desa tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.



Gambar 2.1 Alur penyaluran dana desa.

1 )Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2 )Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

### 3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai sumber informasi mengenai Efektifitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sistem Akuntansi Dana Desa; Widagdo, Widodo dan Ismail, 2016	Akuntabel	Belum memenuhi Standar Akuntansi karena rendahnya SDM perangkat Desa
2.	Analisis Implementasi pengelolaan keuangan Desa dalam penggunaan dan pelaporan Dana Desa; Aidil, Ananda Fitra, 2016	Pengelolaan Pelaporan	1. Pelaporan sangat baik sudah menggunakan aplikasi siskeudes 2. Pengelolaan sangat bagus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
3.	Akuntabel dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Kasus Desa Panggunharjo, Sewon Bantul) Miftahudin, 2018	Akuntabel Transparansi	1. Pengelolaan sudah sesuai perundangan dan akuntabel 2. Pelaporan penggunaan Dana Desa sudah transparansi karena menggunakan media informasi digital yang dapat diakses Partisipasi dalam perencanaan masyarakat masih rendah
4.	Pemakaian Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumagede Godong Grobogan, Aditya Puspa Rinanti, 2019	Pemanfaatan Dana Desa	Pemanfaatan yang efektif sesuai dengan perencanaan, kendala komunikasi karena rendahnya SDM masyarakat.
5	Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakupodo, Watopute, Muna Kendari, Nova Sulastri, 2016	Efektivitas Hambatan	1. Belum efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan 2. Minimnya informasi ke masyarakat 3. Masih rendahnya SDM pengelola Alokasi Dana Desa

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pemerintah desa Panggunharjo Kecamatan Sewon yang berada di wilayah kabupaten Bantul yang berjumlah Subyek dari penelitian ini adalah system pengelolaan Dana Desa di desa Panggunharjo. Obyek penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden yang berasal dari hasil jawaban kuesioner dalam penelitian ini.

1 )Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2 )Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

- b. Data sekunder yaitu data diperoleh dari wawancara dan observasi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas Dana Desa terhadap kinerja ekonomi desa.

### 3. Alat Analisis

Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi keuangan Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan realisasi target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Abdul Halim, 2004). Untuk menjawab permasalahan menggunakan analisis deskriptif. Dimana analisis deskriptif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data sekunder yang nantinya dapat disimpulkan menggunakan kata kata dari hasil penelitian itu sendiri.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Penerimaan DD}} \times 100 \%$$

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Panggungharjo

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga- lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Panggungharjo telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa pasal 2 yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib

1 )Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2 )Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyalurkan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

## 2. Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Ratio efektivitas ini untuk mengukur kinerja dari pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dasar untuk menghitung ratio efektivitas adalah membandingkan anggaran yang ada dengan nilai realisasi penggunaan Dana Desa. Semakin tinggi nilai ratio efektivitas yang dicapai berarti semakin baik kinerja dari pemerintah desa, dan sebaliknya semakin kecil nilai ratio efektivitas yang dicapai menunjukkan kinerja pemerintah kurang baik.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Panggungharjo perlu mengetahui berapa Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah desa pada setiap tahun anggaran, dan berapa nilai realisasi penggunaan Dana Desa. Berikut ini rincian Dana Desa yang diperoleh serta nilai realisasi penggunaan Dana Desa pada desa Panggungharjo dari tahun 2018-2020.

**Tabel 1**  
**Rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa Panggungharjo**

Tahun	Jumlah Dana Desa yang diterima (Rp)
2018	1.087.311.000
2019	1.364.826.000
2020	1.437.616.000

Sumber: Data Sekunder

**Tabel 2**  
**Rincian Realisasi Penggunaan Dana Desa**

Tahun	Jumlah Dana Desa yang diterima (Rp)
2018	1.019.507.450
2019	1.215.883.017
2020	1.423.554.622

Sumber: Data Sekunder

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektifitas, dapat ditunjukkan nilai efektifitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon pada tahun 2018-2020 sebagai berikut :

1 )Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2 )Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

**Tabel 3**  
**Analisis Rasio Efektifitas Penggunaan Dana Desa**

Tahun	Jumlah Dana Desa	Jumlah Realisasi Penggunaan	Ratio Efektivitas
2018	Rp. 1.081.311.000,00	Rp. 1.019.507.450,00	93,76%
2019	Rp. 1.364.826.000,00	Rp. 1.215.883.017,00	89,09%
2020	Rp. 1.437.616.000,00	Rp. 1.423.554.622,00	99,02%

Sumber: Data Sekunder

### 3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas yang diperoleh oleh desa Panggungharjo pada tahun 2018 -2020, dimana pada setiap tahunnya tidak sama ada kecenderungan berfluktuasi, seperti: tahun 2018 nilai ratio efektifitasnya sebesar 93,76% dan ini masuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 ratio efektifitas yang dicapai hanya sebesar 89,09%, dan masuk kategori efektif. Jadi pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Pada tahun 2020 pencapaiannya nilai ratio efektifitas 99,02%, dan ini terjadi kenaikan nilai yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Kategori nilai ratio efektifitas adalah sangat efektif.

Melihat hasil perbandingan rasio antara penerimaan dan realisasi penggunaan Dana Desa yang sudah dianalisis dimana ada kecenderungan naik dan turun tingkat efektifitas dimungkinkan ada faktor yang mempengaruhinya. Pada pelaksanaan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2018 mencapai 93,76% termasuk dalam kategori sangat efektif artinya dalam pelaksanaan realisasi penggunaan Dana Desa sudah mendekati angka kesesuaian yang diinginkan dan apabila sudah mencapai angka 90% keatas maka dapat dikatakan Pemerintah Desa Panggungharjo sudah sukses dan berhasil melaksanakan program Dana Desa yang telah diberikan Pemerintah. Sedang untuk tahun 2019 dilihat dari rasio hasil perbandingan penerimaan dan realisasi pelaksanaan dan dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan angka yang cukup signifikan yaitu hanya 89,09% ,dilihat dari APBDes, Laporan Dana Desa dan ada yang tidak sinkron yaitu pada tahun anggaran 2019 sudah masuk anggaran tetapi program kegiatan itu juga masuk program lain yang dibiayai dari dana lain, sehingga penyerapan dana desa jadi berkurang. Dan untuk tahun 2020 rasio hasil perbandingan penerimaan dan realisasi diperoleh hasil yang sangat fantastis yaitu mencapai angka 99,02% ,bisa dikatakan mendekati sempurna. Hal ini dikarenakan ada kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa untuk tahun 2020 anggaran pembangunan infrastruktur yang belum teralisasi semua dialihkan untuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID19 terutama digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada warga terdampak. Sehingga untuk penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2020 yang dibiayai dari Dana Desa dapat dikatakan terserap habis.

### E. KESIMPULAN

Hasil dari analisis system pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan- ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban.

1 )Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2 )Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

2. Berdasarkan hasil rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo menunjukkan hasil efektif, pada tahun 2018 angka perolehannya 93,76% dapat dikatakan sangat efektif, dan pada tahun 2019 menunjukkan angka 89,09% dan dapat dikatakan efektif, dan lebih bagus lagi tahun 2020 karena memperoleh angka cukup fantastis menunjukkan angka 99,02% yang dapat dikatakan sangat efektif. Hasil ini tidak luput dari peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan.

## F. REFERENSI

- Agustin Amelyana, dkk. *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Ma.
- Fitra, Amanda Aidil. 2016. "*Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*." Universitas Gadjah Mada.
- Halim, Abdul. 2004:93. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah-Edisi revisi*. Yogyakarta: Upp AMP YKPN.
- Hargono, DS. 2010. *Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali*.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi
- Miftahudin, 2018, *Akuntabel dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Kasus Desa Panggungharjo, Sewon Bantul)*
- Muntahanah, Siti. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Jurnal ekonomi.
- Saputra I Wayan. 2014. *Efektivitas Pengelolaan alokasi dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. Jurnal Pendidikan Ekonomi
- Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40.
- Sujarto, Djoko. 1986. *Perencanaan Kota*. Bandung, Penerbit ITB.
- Sukanto, Azwardi. 2014. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. Journal Economic Development.
- Suksesi. 2007. *Efektifitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa di Kabupaten Pacitan*. Dikutip dalam <http://journalfe.unitomo.ac.id/wp>.
- Sumiati. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. Di akses Pada 13 mei 2016
- Sulastri, Nova, 2016 *Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakupodo, Watopute, Muna Kendari*,
- Suparno, A. Suhaenah. 2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta Erlangga.
- Suwandi, Ari Warokka. 2013. *Fiscal Decentralization And Special Local Autonomy: Evidence From An Emerging Market*. Journal of Southeast Asian Research. Vol. 2013 (2013). IBIMA Publishing.
- Todaro, Michael p. 1979. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga, terjemahan Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga. Edisi 6.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Wang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Ejournal pemerintahan integrative, **1(1):51-64**.
- Abdullah, Thamrin & Tantri Francis. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arum Puspa Utami. 2015. *Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen (Studi Kasus di Minimarket KOPMA Universitas Negeri Yogyakarta)*. Skripsi S1 jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

1 )Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2 )Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

- Fitria Sari dkk. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen pada Minimarket. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* (Nomor 2). Hlm. 1-22.
- Giltosudarmo, Indriyo. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFPE.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kotler & Amstrong. 2008. *Prinsip - Prinsip Pemasaran Jilid 1*. (Alih Bahasa: Bob Sabran, M.M). Jakarta: Erlangga.
- Laksana Fajar. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lupiyoadi Rambar. 2014. *Pemasaran*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Putri Agustina Salmon, Ade. *Pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian konsumen (Studi Kasus Pada Indonesia Saller Perusahaan E-Commerce)*. Skripsi S1 jurusan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 2012.
- Roki Pariyanto. 2012. *Pengaruh Variabel Retail Mix terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Minimarket Indomaret di Kota Semarang)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Rusli. *Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Motor Yamaha di Makassar*. Skripsi S1 jurusan Manajemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Schiffman & Kanuk. 2004. *Perilaku Konsumen* (edisi 7). Jakarta: Prentice Hall.
- Sofjan Asauri. 2011. *Manajemen Pemasaran*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarwan Ujang. 2011. *Perilaku Konsumen "Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran"*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suryani Tatik. 2012. *Perilaku Konsumen "Implikasi Pada Strategi Pemasaran"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wijaya Tomy. 2011. *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta Barat : PT. Indeks
- Zulkariman, 2014. *Entrepreneurial Marketing*. Yogyakarta : Graha Ilmu